

### BAB III

#### **Deskripsi Kasus Perbuatan Kampanye Hitam / *Black Campaign* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PILPRES) Tahun 2014**

##### **A. Jelang Pilpres, Kampanye Bohong dan Fitnah Merebak**

Masa kampanye pemilihan presiden belum dimulai, namun perang isu dan opini mengenai capres telah marak di media massa dan media sosial. Pemberitaan dan informasi yang beredar di dua media tersebut tak lepas dari kabar bohong dan fitnah yang sengaja dihembuskan oknum pendukung capres untuk menjatuhkan pasangan capres lainnya. Menurut direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, terdapat kampanye jahat atau bohong yang mengarah ke capres Jokowi maupun Prabowo. Ia mencatat ada delapan isu yang mengarah ke Jokowi dan intensitasnya semakin meningkat mendekati pilpres. Isu-isu tersebut diantaranya terkait ketidaksukaan sebagian umat Islam yang menganggap Jokowi pro pada agama lain, Jokowi dianggap sebagai antek Vatikan dan Israel setelah bertemu dengan duta besar, memiliki keturunan Tionghoa sehingga disebut sebagai antek asing, dan persoalan akte nikah. Jokowi juga disebut menerima dana 10 triliun sebagai mahar dalam konteks pencawapresan dari Jusuf Kalla, dibiayai cukong, terdapat nama Jokowi dalam Ujian Nasional, dan belasungkawa di berbagai tempat terkait isu kematian Jokowi, ujarannya saat diskusi di Warung Kopi Deli. Sedangkan untuk Prabowo, Ray menyebutkan terdapat empat isu yang justru marak saat pemilu legislatif, dan cenderung menurun mendekati pilpres. Keempat isu tersebut diantaranya isu anti kaum Tionghoa,

padahal dia mendorong Ahok maju sebagai Wakil Gubernur. Lalu isu uang dengan cap Prabowo, isu HAM 1998 dan soal anak prabowo yang punya kecenderungan transgender. Mestinya orientasi seksual tidak boleh menjadi kampanye jahat<sup>66</sup>.

Menanggapi maraknya isu bohong dan fitnah di media massa dan media sosial, Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers mengkategorikan hal tersebut sebagai pelanggaran berita oleh media massa. Agus mengatakan ada beberapa kategori pelanggaran. Pertama, kategori berita bohong atau fitnah. Dalam etika jurnalistik wartawan bisa dikeluarkan sebagai jurnalis. Dulu pernah terjadi ada media yang memuat wawancara dengan istrinya Azhari. Ternyata istrinya bisu dan tidak ada wawancara, katanya pada acara yang sama. Kategori kedua, lanjut Agus, berita menghakimi. Baru diduga terlibat kasus busway Transjakarta tapi seakan-akan media mengambil peran sebagai penegak hukum. Pelanggaran berikutnya adalah berita yang tidak berimbang, jadi hanya mewawancarai yang tertuduh, pihak lainnya tidak diwawancarai. Terakhir, berita negatif, dalam berita negatif asal *cover both side*, sudah diwawancarai, dan sudah verifikasi serta sudah menaati kode etik tapi framenya negatif. Menurut Agus yang menjadi persoalan dalam perang informasi seperti ini adalah munculnya berita bohong dan fitnah. Ia berharap media massa tidak terpancing dengan yang ada di media sosial. Yang juga harus dilihat, menurut Agus, adalah media online. Sebab media online

---

<sup>66</sup> <https://www.google.co.id/elang.Pilpres%20.Kampanye.Bohong.Dan.Fitnah.Merebak> diakses pada 20 Desember 2014

merupakan bertemunya media sosial dengan media massa dan pembaca bisa berpartisipasi dengan mengomentari berita itu. Karena kalau tidak hati-hati, dampaknya ada pada pilpres nanti. Kalau informasi yang diterima masyarakat adalah fitnah, mereka akan memilih berdasarkan info yang tidak benar katanya. Lalu mengenai informasi yang beredar di media sosial, menurut Agus, media konvensional jangan sampai terpengaruh oleh media sosial. Menurut Agus, orang yang akrab dengan social media adalah masyarakat urban, anak muda dan kelas menengah. Tambahnya, kalau dalam survei mereka adalah *swing voter* atau orang yang memutuskan memilih satu hari sebelum pencoblosan. Mereka umumnya kritis, tuturnya. Menanggapi pemberitaan atau kampanye jahat di media massa maupun media sosial, anggota Komnas HAM, Sandra Moniaga mengatakan kampanye dengan berita kebohongan dan fitnah melanggar prinsip HAM karena merendahkan martabat. Pertama soal hak, kedua soal siapa yang berkewajiban. Negara berkewajiban menghormati. Harusnya Bawaslu dan polisi, mereka menindak penyebar berita bohong, ujarnya. Ia menjelaskan kampanye negatif bergantung menurut siapa, negatif bagi mereka bisa baik menurut warga agar bisa memperoleh info secara benar. Menurutnya, yang harus dihindari adalah kampanye bohong atau fitnah, jadi bukan negatif atau positif. Ia menilai masyarakat perlu tahu rekam jejak capres dan cawapres, itu wajib dibagi pada publik. Saya ingin mengusulkan dengan untuk tidak menggunakan istilah black campaign karena itu merujuk pada rasisme. Karena itu kampanyenya warga kulit

hitam di Amerika Serikat. Jadi mari pakai istilah kampanye bohong atau fitnah jadi sesuai substansi, katanya<sup>67</sup>.

## **B. Menyingkirkan Fitnah Pilpres Dalam Kecelakaan Politik di Bulan Puasa**

presiden (Pilpres) tahun ini mungkin sangat berbeda jauh dengan tahun yang sebelumnya. Titik temu perbedaannya adalah untuk tahun ini Pilpres jatuh pada bulan puasa, 9 Juli 2014. Sedang tahun yang sebelumnya hanya sebatas pemilihan dihari-hari seperti biasanya. Tentu dalam hal ini sangat menarik sekali kita perbincangkan, dan lebih menarik lagi pada mereka yang menjadi team sukses para Capres kalau sampai hari ini juga masih digunakan ajang untuk kampanye, apalagi bagi seorang Capres. Kemilitanannya sehingga membuahkan “keimanan” menang akan dirinya (capres) di bulan ramadhan/puasa, ia tak ubahnya baja, meski apapun yang membentur mungkin team sukses/Capres akan baik-baik saja ada aku dan dirimu, hanya satu pintaku, mungkin begitulah potongan lirik orang yang lagi kasmaran (dalam kancah perpolitikan khususnya) sebagaimana Wali Band ungkapkan, dukunglah siapa yang lagi dikampanye-kan atau siapa yang berkampanye, dalam hal ini Capres. Sehingga politik yang demikian tidak lagi memandang bulan puasa yang penting berkuasa. Disini team sukses atau Capres harus hati-ati diwilayah Indonesia, khususnya Madura, yang mayoritas agama islam karena orang akan menilai seberapa jauh kesungguhan

---

<sup>67</sup><https://www.google.co.id/elang+Pilpres%2C+Kampanye.Bohong.Dan.Fitnah.Merebak> diakses pada 20 Desember 2014

*sampean* beribadah ketimbang dunia perpolitikan, kalau anda (capres atau team suksesnya) lebih dominan berpolitik ketimbang ibadah maka tunggulah pariwisata berikutnya, isu negatif yang akan menjadi fitnah satu diantara yang lainnya. Beberapa hari yang lalu saja, jauh sebelum bulan puasa, awak media sudah mulai membeber salah satu Capres. Seperti Tabloid Obor (Edisi 01>5-11 Mei 2014) yang menyerbu pesantren, Annuqayah khususnya, sedikit menyingung Jokowi lebih ke Tiong hoa-an (non islam) atau jokowi dinilai lepas janji karena sudah pindah jabatan sebelum usai menjadi Gubernur Jakarta. Ini salah satu bukti bahwa disisi lain Capres kita sudah demikian lemah kometmentnya untuk memimpin rakyat, seharusnya selesaikan dulu janji karena sudah disumpah akan menjabat gubernur DKI baru setelah itu maju agar makna politik kita di Indonesia meski dasarnya berkuasa tetapi setidaknya berkuasalah menurut jalanya (*celenih celenah, lakoneh lakonah*, kata orag madura) sehingga tidak negatif makna politik yang kita punya. Mungkin sekarang musim janji yang memang minus bukti. Hati-hati saja kalau sampai bulan puasa masih kampanye, takut-takut puasanya berbunyi puasa kampanye, nilai ibadahnya habis karena mementingkan kampanye yang tidak jauh dari sogok-menyogok, menjelekkkan Capres yang lainnya. Disisi lain, capres Prabowo juga disinggungnya (Jawapos, 24 Juni 2014), kasus 98 atas nama HAM, yang berupa penculikan dan penghilangan orang secara paksa entah menggunakan pemutih atau bagaimana-- yang sampai saat ini belum ada pen/kejelasan siapa yang telah berhianat dan tega melakukannya. Ini pun tidak bisa dijawabnya, siapa juga yang menjadi antek-antek dibelakang Prabowo. Mungkinkah Pak. Prabowo takut untuk mengungkapkannya karena dibelakang

ada pohon yang rindang sudah disediakan kuburan di bawahnya untuk Pak. Prabowo sendiri, atau mungkin akan menjadi gagalnya seorang Capres jika prabowo ungkapkan karena terjat kasus yang sedang asyik bergoyang. Dari kedua uji coba pembacaan saya ini, KPU-lah seharusnya selektif , tegas menerima lamaran untuk menjadi calon president kita di Indonesia seperti apa dan bagaimana kreterianya, karena di khawatirkan yang melamar sudah doyan melakukan “pacaran” yang juga sering menjalin “pereselingkuhan” sehingga kasuspun bukan suatu kebetulan melainkan atas nama kedoyonan itu sendiri saya rasanya. Atau yang sebelumnya (KPU), yaitu anggota dewan harus berbenah diri atas undang-undang yang mungkin menodai nahkoda pemilihan, entah mulai dari calon daerah hingga pusat. Sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka berlakulah istilah maju kenak dan mundurpun juga kenak. Artinya apa? Dalam pemilihan president kali ini meski calon president kita terjangkit HIV (Hidup Itu Vul) kasus, kalau sebentar lagi kita akan mencontrengnya, maka mundurpun negri kita akan kesepian atau sebaliknya semakin ribet, siapa pemimpinnya atau ingin menambah berapa anggaran selanjutnya kalau semua ingin dirumbaknya, mulai dari mencalonkan lagi siapa ketua KPU atau Capres. Tetapi, apakah kita sanggup atau tenang dipimpin oleh orang-orang yang banyak (semuanya sama-sama) berkhianat/berkasus?, kita sekarang benar-benar kecelakaan politik--bahkan sebelum-- bulan puasa, dari inilah kemudian dalam pilpres kalau memang kita hendak tetap maju, dalam artian tetap mencontrengnya, marilah kita hentikan memfitnah sesama kalau memang semuanya (capres) berkhianat pada kita semua. Karena Capres kita bukan oplosan yang tidak jelas agama dan negaranya, tinggal

kita ikhtiyar, dan sudah saatnya kita kampanyekan hidup istikharah, yang dalam konotasi ini kita memilihnya tidak lepas akses informasi dari Tuhan, minimal mendoakan semoga calon pemimpin kita amanah setelah kita menelanjangi capres kita, sehingga tahu betul siapa Capres yang benar-benar memihak dan jatuh cinta kepada kita, Indonesia Raya. Inilah salah satu cara kita menyingkirkan fitnah berkelanjutan. Semoga pemberian Tuhan--setelah kita menelanjangi tentang Capres-jatuh pada sosok pemimpin yang terbaik dan menjadi pemimpin yang bisa menjalankan kandungan makna berpuasa akan *amar ma`ruf nahi mungkar* (memerintah/melakukan hal yang baik dan mencegah yang keji). Selamat berpuasa para pemimpin-pemimpin bangsa <sup>68</sup>

Fitnah yang merupakan bagian dari kampanye hitam, kini marak pada Pilpres yang diikuti dua pasang kandidat. Peneliti Senior SMRC Sirajuddin Abas mengatakan, tujuan utama fitnah kepada capres tertentu karena untuk memberikan keraguan dan kekhawatiran kepada masyarakat terhadap orang yang difitnah. "Alasannya karena tidak semua orang dapat memverifikasi informasi, statment, atau data kepada si pembuat fitnah, dan itu akan meruntuhkan pilihan kepada capres tertentu," kata Sirajuddin kepada Bincang Pagi, Di Metro TV, Kamis (3/7). Selain itu kata dia, fitnah disebar kepada publik agar dianggap seolah-olah pertarungan kedua calon presiden sangat dekat, sehingga harus melakukan fitnah sebagai senjata terakhir. "Padahal eletabilitas, dan popularitas, belum tentu melewati capres lainnya. Jadi seolah-olah itu senjata pamungkas," jelas

---

<sup>68</sup> <http://vilaseresehan.blogspot.com/2014/07/menyingkirkan-fitnah-pilpres-dalam.html> diakses pada 16 Desember 2014

Sirajuddin. Alasan terakhir, menurut Sirajuddin, yakni untuk memobilisasi massa mengambang. Dengan memunculkan fitnah warga yang belum mempunyai pilihan dapat memilih capres lainnya. (MTVN)<sup>69</sup>

### **C. Fitnah Keji Jelang Pilpres, Foto Umroh Jokowi Direkayasa**

Bangsa ini harus prihatin karena memang semakin jelas sudah ada oknum-oknum yang ingin merusak demokrasi yang kita bangun. Pemilu Presiden yang demokratis yang kita harapkan dan kita agungkan bersama-sama sudah sebulan lebih dicerai oleh Kampanye-kampanye Hitam yang dialamatkan kepada kubu Jokowi. Mulai dari beredarnya Tabloid Obor Rakyat, Fatwa haram untuk memilih Jokowi dari sekelompok Ulama hingga beredarnya foto-foto para Kyai kondang yang diupload ke berbagai media social yang ditambahi dengan text-text yang dipolitisir untuk mendegradasi nama Jokowi. Dan ketika musim Kampanye sudah selesai dan dilanjutkan dengan masa tenang, tadinya kita semua berpikir Kampanye-kampanye hitam itu sudah reda. Dan semua orang tinggal menunggu tanggal 9 Juli untuk melakukan pencoblosan. Tetapi di masa tenang ini yang juga berada dalam Bulan Suci bagi umat Islam, tiba-tiba kita dikejutkan dengan suara-suara sumbang tentang perjalanan umroh capres Jokowi ke Mekah. Mulai dari mengkritik jangka waktu Ibadah Umroh yang hanya dua hari, membesar-besarkan perihal ibadah Umroh Jokowi yang disebut sebagai Pencitraan, hingga yang terakhir yang paling keji adalah mengedit/ merekayasa Foto-foto Umroh Jokowi

---

<sup>69</sup> <http://lampost.co/berita/fitnah-di-pilpres-marak-ini-alasannya> diakses pada 15 Desember 2014



dengan memutar balik posisi baju Ihram yang digunakan Jokowi di Mekah. Semakin jelas sudah bahwa pihak-pihak yang jahat yang merekayasa foto-foto ini kemungkinan besar adalah kelompok Islam Radikal (entah belum tahu yang mana). Kenapa bisa yakin seperti itu karena issue yang ditiupkannya ini adalah tentang baju Ihram, yang mana mereka sudah tahu persis apa akibatnya kalau ada orang Islam yang terlihat memakai baju Ihram terbalik. Dan dengan mengupload/mengedarkan foto Jokowi dengan baju Ihram terbalik mereka berharap agar umat Islam lainnya yang simpati kepada Jokowi akan berbalik membenci Jokowi. Keji sekali perbuatan mereka di bulan Puasa ini

Dari oknum yang menjelek-jelekan nama Jokowi didepan umat islam melalui media sosial berharap nanti ketika pelaksanaan PILPRES Jokowi sudah tidak layak untuk dipilih sebagai Presiden khususnya dari pandangan umat Islam karena sudah tidak benar dalam menjalankan perintah allah dengan baik namu dari perbuatan mereka oknum yang tidak bertanggung jawab itu melanggar undang yang tetang penyiran berita melalui media yang tidak sesuai dengan faktanya hanya merekayasa dari gambar yang dapat merusak nama baik dari capres jokowi

Karena dari menurut yang seseorang yang dapat mebedakan bahwa foto itu asli atau hasil rekayasa menyatakan “Saya bukan ahli Photoshop ataupun seorang Pakar Telematika, tetapi setahu saya kalau mau melihat dan ingin mengetahui kemungkinan sebuah foto digital di edit atau direkayasa, langkah mudahnya adalah men-Zoom foto tersebut hingga 3-4X pembesaran. Dan bila diperhatikan pada objek yang dicurigai telah diedit, bisa dilihat ada perbedaan

yang signifikan pada pixel-pixel sekitar objek tersebut. Dari pernyataan tersebut bahwa foto yang yang ditampilkan dimedia sosial tidak dapat dibnarkan .

Kalau foto asli maka dengan pembesaran hingga 4 X, pixel-pixel pembentuk gambar tersebut akan terlihat sama kasarnya antara setiap bagian hingga seluruh gambar dari foto. Tetapi kalau foto tersebut diedit, maka akan terlihat tingkat kekasaran yang berbeda dari bagian gambar tersebut. Bagian gambar yang ditambahkan biasanya mempunyai resolusi lebih tinggi ataupun Pixel-pixel yang lebih halus dibanding pixel-pixel di bagian lainnya. Begitu juga kalau ada gambar yang dipotong kemudian disambung biasanya akan Nampak keganjilan/ perbedaan yang mencolok antara pixel-pixel yang ada disekitar objek yang dicurigai sudah diedit. Dari gambar-gambar diatas saya yakin bahwa gambar-gambar dibawahnya tersebut sudah mengalami pengeditan. Dan secara logika, bila benar terjadi Jokowi salah dalam mengenakan pakaian Ihram, tentu saja saat itu juga orang-orang disekitarnya akan memperingatkan Jokowi untuk merubah cara mengenakannya. Tidak mungkin sama sekali kalau orang disekitarnya tidak melihat dan tidak memperingatkan Jokowi. Sehingga dari pemberitaan Jokowi melalui media sosial tidak dapat dibenarkan ini adalah perbuatan yang jahat melalui media sosial oleh oknum-oknum yang menginginkan imeg nama jokowi buruk sehingga ketika pasca pemilihan presiden dan wakil presiden orang-orang tidak lagi memilih Jokowi sebagai Presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 menjadi heboh akan berita yang belum tentu benar sehingga membuat para calon pemimpin getar dengan semua apa yang dilakukan para tim sukses dari masing-masing kandidat yang

akan menjadi pemimpin bangsa pada tahun 2014-2019 yang menentukan nasib bangsa ini akan dibawa arah yang lebih baik atau buruk.

#### **D. Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI)**

keluarkan maklumat haram untuk memilih pasangan Jokowi-JK dalam Pilpres mendatang. Alasannya, pasangan itu dianggap meresahkan dan mengancam eksistensi umat Islam. Pasangan itu juga dinilai akan berpotensi menciptakan iklim sentimen keagamaan yang dapat bermuara pada konflik horizontal. Penilaian itu muncul atas keputusan dan rencana politik yang selama ini telah dinyatakan secara terbuka, baik oleh institusi maupun oleh tim sukses bila pasangan itu berhasil terpilih. FUUI yang selama ini menyatakan bersih dari politik praktis, kini merasa wajib untuk memberikan pandangannya. Pihaknya menyatakan, sikap itu muncul agar umat Islam tidak salah dalam memilih pemimpin.

Putusan maklumat ini diakui telah melalui proses yang panjang. Sejak berdiri pada tahun 2001, FUUI selalu menghindari untuk masuk dalam ranah politik praktis. "Saya perlu pertegas, ini tidak dalam posisi dukung mendukung salah satu calon, kami berkomitmen hanya untuk memikirkan umat, kami bersih dari kepentingan politik praktis," ujar Athian Ali Ketua FUUI, kepada wartawan di Masjid Al-Fajr, Jalan Cijagra, Kota Bandung.

Dalam pilpres tahun ini pihaknya mengeluarkan maklumat dalam bentuk istihad syar'i. Hal ini diakuinya untuk membimbing umat Islam agar mereka bisa memilih sesuai dengan syariat Islam. Ia juga menyatakan bahwa pernyataan resmi ini dikeluarkan untuk menyelamatkan umat agar tidak mengambil keputusan yang salah. Athian sendiri mengakui bahwa sangat mungkin maklumat yang dikeluarkan akan terkesan mendukung salah satu calon dan menafikan calon lain. Namun, ia mengklaim bahwa putusan ini murni ditinjau melalui dasar syar'i dan hukum Islam. "Kalau sudah bicara hukum ini tentu saja kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah swt, dunia akhirat," katanya. Ia menambahkan bahwa sebenarnya secara syar'i, pihaknya tidak melihat sosok ideal pada dua calon presiden. Menurutnya tidak ada satupun calon presiden yang dianggap layak untuk dipilih mewakili umat. Namun, dalam hal ini mereka harus melihat mana yang nilai kerentanannya bagi umat paling rendah. Ia tidak menafikkan adanya ajakan salah satu pihak Capres agar FUUI memberikan dukungannya. Namun, FUUI tetap menyatakan sampai detik ini tidak pernah tereseret dan tidak ada hubungan dengan salah satu timses manapun. "Kami sedang berusaha memberi kesan bahwa kami tidak mewakili capres manapun, jadi kami tidak ada niatan untuk merapat kepada capres manapun," tegasnya. Ia menjelaskan bahwa putusan ini dikeluarkan salah satunya berkaitan dengan niat kubu Jokowi-JK untuk memperjuangkan pencabutan ketetapan MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang Larangan Paham Komunisme. Hal itu menurutnya diikuti pula oleh

keberpihakan kubu capres nomor dua itu kepada paham yang menurut Syariat Islam sesat, seperti Ahmadiyah, Islam Liberal, dan Syiah.

Pengharaman FUUI ini berangkat pula dari keinginan kubu Jokowi-JK untuk menolak Perda Syariat Islam. Hal ini dianggap sebagai bentuk pernyataan terbuka terhadap kebencian pada Syariat Islam. "Karena secara UU No.11 tahun 2011 dan UU Otonomi Daerah sangat memungkinkan lahirnya sebuah Perda yang melindungi adat istiadat di daerah termasuk agama, pandangan, paham dan sebagainya. Seharusnya dihormati karena Islam salah satu dari enam agama yang diakui oleh negara<sup>70</sup>.

---

<sup>70</sup> <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/07/01/n7zvp7-alasan-forum-ulama-haramkan-memilih-jokowijk> diakses pada 30 september 2014